

ABSTRAK

PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP KORUPTOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ASRUL RINALDI *

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Berhubung yang digunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli.

Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat. Kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, seperti alasan dari kondisi yang ada, sehingga masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati

Kata Kunci: Kebijakan, Hukuman Mati, Korupsi.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

1. Dr.MARZUKI SH.Mhum
2. Dr. MUKIDI SE,SH,MH

**APPLICATION OF DEATH PENALTY POLICY AGAINST
CORRUPTORS IN ERADICATING CORRUPTION CRIMES
FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

ASRUL RINALDI *

The application of the death penalty to perpetrators of corruption is still a matter of debate among experts. The formulation of the problem in the research in this thesis is how to regulate the death penalty in the Law on the Eradication of criminal acts of corruption, what factors influence the application of the death penalty in corruption, how is the policy of criminal law in the application of the threat of capital punishment in corruption.

This research is juridical normative. The source of data in this study is secondary data. Collecting data using library research methods. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences.

The regulation of capital punishment in the Law on the Eradication of Corruption Crimes is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which can be imposed on corruptors under certain circumstances. Since the word "can" is used in Article 2 paragraph (2), the imposition of the death penalty on the perpetrators of corruption is facultative. This means that even though the criminal act of corruption is carried out in "certain circumstances" as referred to in Article 2 paragraph (2), it may not be subject to a death penalty.

The results of the discussion conclude that the factors that influence the application of the death penalty in corruption are difficult to apply, especially to elements of emergency conditions. The criminal law policy in the application of the death penalty in corruption in Indonesia currently has many weaknesses, such as technical juridical reasons, so it is still very difficult to implement at this time. There has not been a single case of corruption that has been sentenced to death.

Keywords: Policy, Death Penalty, Corruption.

** Students of the Postgraduate Program in Legal Sciences, Islamic University of North Sumatra.*

1. Dr.MARZUKI SH.Mhum
2. Dr. MUKIDI SE,SH,MH